

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBIAYAAN DI *BAITUL MĀL WA AT TAMWĪL* USAHA
GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Nur Aisyah

NIM C92215096



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dwi Nur Aisyah

NIM : C92215096

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan
Di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Usaha Gabungan
Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan

Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya
sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan



Dwi Nur Aisyah

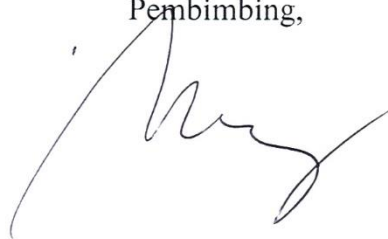
NIM : C92215096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan “yang ditulis oleh Dwi Nur Aisyah NIM. C92215096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 16 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, S.H, MH

NIP.196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Dwi Nur Aisyah NIM C92215096 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanAmpel Pada hari Selasa, 25 Juni 2019 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Sri Warjiyati, S.H, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP.196806271992032001

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP.198710022015031005

Surabaya, 25 Juni 2019

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Nur Aisyah
NIM : C92215096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : 9b16.dwinuraisah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAL WA AT TAMWIL* USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PEMBANTU BANGKALAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2019

Penulis

Dwi Nur Aisyah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Praktik pembiayaan di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori Hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik pembiayaan di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama praktik pembiayaan di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan dalam hal objek akad tidak ada. Selain itu pihak *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri dalam pengaplikasian akad tidak sesuai dengan akad yang seharusnya dipakai oleh pihak *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan. Kedua menurut Hukum Islam penulis menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukun yaitu objek tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak *Baitul Māl Wa At Tamwīl*. Dan jika dianalisis menggunakan Fatwa DSN MUI No 27 Tahun 2002, penulis menyimpulkan bahwa Fatwa tersebut tidak tepat digunakan sebagai acuan *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan dalam praktik pembiayaan *bay' bithasaman ājil*.

Adapun saran bagi pihak *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan yaitu diharapkan dapat mengaplikasikan akad sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam praktik pembiayaan di *Baitul Māl Wa At Tamwīl* Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.

DAFTAR ISI

COVER	0
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP BMT , AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> , <i>BAY’ BITHAMAN AJIL</i> , DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 27 TAHUN 2002.....	25
A. Konsep BMT	25
1. Pengertian BMT	25
2. Fungsi BMT.....	26
B. Konsep <i>Murābahah</i>	26
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang rahmat bagi seluruh dunia, Islam juga mampu membawa umat kepada jalan kebenaran. Oleh sebab itu Islam selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjalani kehidupannya, dengan menuntun serta memberikan petunjuk terhadap setiap penganutnya. Selain mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya (*habbluminallah*), agama Islam juga mengajari umatnya dengan baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia (*habluminannas*), terlebih interaksi dalam bidang perekonomian yang hampir tidak pernah lepas dari aktivitas manusia. Disisi lain, Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem hidup (*manhāj al-ḥāyah*). Khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi juga dipandang memiliki basis struktur keilmuan yang sangat kuat.¹

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya yang bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek

¹Yulizar D Sanrego *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kroya Abadi, 2014), xvii.

وَتَعَا وَتُو عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُزُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

لَعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah, 2).⁵

Tolong menolong dalam bermuamalah tidak bisa ditinggalkan karena dapat memudahkan jalan perekonomian. Ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat *uluhiyyah* dan *rabaniyyah*, seseorang harus berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Syari'at (Allah), melalui syariat-Nya.⁶ Seperti kaidah Fiqh,

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتَّى يدلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

Artinya : “Segala sesuatu (dalam hal bermuamalah) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan.”

Segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Aktivitas dalam ekonomi Islam adalah jual beli. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini merupakan tanda bahwa perekonomian maju seperti adanya *Baitul Māl Wa At Tamwīl* (BMT).

Lembaga keuangan mikro kecil dalam konteks Islam ini yang tampil dalam bentuk BMT secara empiris lembaga ini menunjukkan

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia *AlQuran Tafsirnya* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011),349

⁶ Ika yunisa Fauia dan Abdul Kadir riyadi *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014),10-11

Lembaga keuangan non bank *Baitul Māl Wa At Tamwīl* yang selanjutnya disebut BMT seperti halnya lembaga keuangan lainnya yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana, memberikan pinjaman, dan jasa. Dana dari anggota akan disimpan dalam bentuk tabungan, investasi yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman atau pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan adalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.

Kehadiran BMT UGT Sidogiri dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan para ustad alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktik riba yang terjadi disekitar pondok pesantren Sidogiri. Maka dari itu, BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri melakukan penghimpunan danan dan juga

⁸Jamal Lulail Yunus *Manajemen Bank Syariah* (Malang: UIN-Malang Press,2009),109-110

1. *wadī‘ah*,
2. *muḍārabah* umum,
3. deposito,
4. *qirād* atau pun *qard*.

Pada sisi penyaluran dana, BMT UGT Sidogiri melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu :

1. akad *muḍārabah*, dan
2. *musyārahah*,

sedangkan pada sistem jual beli yaitu :

1. *murābahah*,
2. *bay‘ bithaman ājil* maupun; dan
3. sistem nirlaba yaitu *qard hasan* (sosial).

Bay' Bithaman Ajil merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. *Bay' bithaman ājil* merupakan varian dari konsep *murābahah*, dimana nasabah atau anggota diizinkan untuk menunda penyelesaian pembayaran untuk barang yang dibeli dalam periode tersebut, dengan cara ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan *bay' bithaman ājil* merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli yang ditangguhkan dan bukan jual beli spot (*bay'* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ājil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang diperbolehkan oleh syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli dari BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.¹¹

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 192

1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad

Yang dimaksud disini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.¹²

2. Objek akad (transaksi)

Objek harus jelas, barang harus suci dan dapat diserahkan.

3. Lafadz (*ṣighat*) akad

Pengucapan akad itu merupakan ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang berakad untuk menunjukkan keinginannya untuk mengesankan bahwa akad ini sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-kabul).

4. Harga

Harga jual beli dari bank merupakan harga jual beli ditambah margin dengan sistem pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak berubah selama perjanjian belum berakhir.

¹² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta; Darul Haq, 2001), 27-29

BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dalam pembiayaan *bay' bithaman ājil* objek tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, seperti ada nasabah ingin hutang uang namun diaplikasikan ke pembiayaan *bay' bithsaman ājil* dimana objek seharusnya berupa barang. Jika nasabah atau anggota ingin hutang uang maka menggunakan akad *qard* dan disini terdapat ketidaksesuaian akad yang digunakan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Selain itu, menurut pak Hosin selaku manager BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan Bangkalan menyatakan bahwasanya pengaplikasian *bay' bithaman ājil* diterapkan seperti *ijārah muntahiya bit tamlik* (IMBT).¹⁴

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV Tahun 2000 tentang *murābahah*, yaitu akad *murābahah* menurut Fatwa ini menjadi kebolehan untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka diperbolehkan.

¹⁴Wawancara dengan Pak Hosin selaku Manager tanggal 27 Oktober 2018 di BMT UGT Sidogiri.

1. Praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan

C. Rumusan Masalah

- ## Sidogiri Capem Bangkalan?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan?

D. Kajian Terdahulu

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik *bay' bithaman ajil*, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Skripsi berjudul “Pembiayaan *Bay‘ Bithaman Ājil* dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Arif Kurniawan pada tahun 2012.¹⁶ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara umum pembiayaan *Bay‘ bithaman ājil* dan dengan adanya *Bay‘ bithaman ājil* disini dapat membantu perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan tetapi terbatas pada modal yang dimiliki. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasan praktik *bay‘ bithaman ājil*. Sedangkan perbedaan terletak pada Analisis Hukum Islam sebagai analisis yang dipakai pada penelitian ini.

¹⁶Arif Kurniawan, *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Cirebon (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012)

- ¹⁷Rukaya Ulvi, *Analisis Sistem Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta*, Surakarta (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

[illegible]

masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

16

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).¹⁹ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya untuk memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang analisis Hukum Islam terhadap pembiayaan *bay’ bithaman ajil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Maka penulis menggunakan metode kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut :

[illegible]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat atau lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada didalam budaya setempat.²⁰ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang pembiayaan *Bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

2. Data Yang Dikumpulkan

a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang bagaimana cara terjadinya akad *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan
- 2) Data tentang praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan
- 3) Data nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkala
- 4) Data tentang ketentuan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 27 Tahun 2002 terhadap praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, yang dalam hal ini akan digunakan untuk menganalisis praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

²⁰Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : ANDI,2017), 13

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori tentang *murābahah*, *bay‘ bithasaman ājil* yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti secara langsung sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.²¹ Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.
- 2) Manager BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.²²Dimana sumber data sekunder inilah yang menjadi rujukan (penunjang) untuk melengkapi dan membantu dalam mengalisis data, seperti:

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan transaksi pembiayaan *bay' bitsaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Guna membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵ Kegunaan dari metode ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses permasalahan tentang analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori Hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

[illegible]

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang “Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan”. Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Bab pertama berisi Pendahuluan, yang dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab keempat berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 terhadap praktik pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

[illegible]

KONSEP BMT, *MURABAHAH*, KONSEP *BAY' BITHAMAN AJIL*
DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NO 27 TAHUN 2002

1. Pengertian BMT

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *Ijārah*, dan titipan.

¹ Abdul Manan *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), 353

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010),363

Murābahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera pembayaran dilakukan secara tangguh.⁵

Murābahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *Murābahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti “*keuntungan, laba, tambahan (margin)*”.⁶

Kata *al- murābahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِّبْهُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murābahah* juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang

⁶ Mulya E Siregar dan Ahmad Buchori *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta : 2016), 07

Menurut Sofyan Harahap *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹¹ Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan *Murābahah* menjual suatu barang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *Murābahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan “Akad *Murābahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Murābahah merupakan suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak

¹¹Syofian S Harahap *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta : LPEE-Usakti,2004),93

bank Islam dengan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil yang dianut oleh konsep *mudhārabāh* dan *musarakah*.¹²

Maulana Taqi Usmani dalam tulisannya mengenai *Murābahah* mengemukakan bahwa, “*Most of the islamic banks and financial institutions are using Murābahah as an Islamic mode of financing and most of their financing are based on Murābahah.*”¹³

Menurut para ahli dengan hukum Islam mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai berikut :

- a. Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *bai' al-murābahah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴
- b. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.¹⁵
- c. Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum Maliki, mendefinisikan sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.¹⁶

¹²Nurul Hudan dan Mohamad Heykal *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta : Kencana,2010), 43

¹³ Maulauna Taqi Usmani, Islamic Finance; Musharakah & Mudharabah, www.darululoomkhi.edu.pk/fiqhislamicfinancemurabahah.html, terakhir dikunjungi 20 Februari 2019

¹⁴ Muhammad Yazid *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 175

¹⁵ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al Kattani. Et.al , Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358

¹⁶ Muhammad Yazid *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 176

b. Obyek yang diperjualbelikan harus :

- c. *Şighat*

- Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *Murābahah* adalah sebagai berikut :

- ²⁷Muhammad Yazid *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014). 181

b. Mengetahui keuntungan

c. Harga pokok dapat diukur dan dihitung

²⁸Ibid.

- d. Jual beli *Murābahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba
- e. Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *Murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *Murābahah* selanjutnya tidak sah.²⁹

Akad *Murābahah* akan berakhir³⁰, apabila terjadi hal-hal berikut:

- ### C. Konsep *Bay' bithaman ājil*

²⁹Ibid., 182

³⁰Mulya E Siregar dan Ahmad Buchori *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.....,57

³¹Ibid., 63

Bay' bithaman ājil disebut juga dengan singkatannya yaitu *bai' muajjal* yang secara harfiah berarti penjualan dengan angsuran (*credit sale*). *Bay' bithaman ājil* adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sedangkan barangnya diserahkan di muka ketika jual beli tersebut diperjanjikan. Pembayarannya tertunda tersebut menjadi pinjaman (tanpa bunga) bagi pembeli yang dapat dibayar sekaligus pada waktunya atau dibayar dengan cicilan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.³³

³²Hulwati *Ekonomi Islam dan Praktinya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta :Ciputat Press,2009), 89

³³Sultan Remy Sjahjedin *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 231

[illegible]

Kontrak *Bay' bithaman ājil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (*al-salam*) Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara tangguh boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertangguh.

Namun Ijma' ulama berpendangan bahwa jual beli secara bertanggung dibolehkan berdasarkan keumumannn jual beli sebagai mana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah 275. Oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.

Syarat-syarat yang berlaku bagi suatu *bay'* atau jual beli juga berlaku pada *bay' bithaman ājil* , dibawah ini beberapa hal khusus yang berkaitan dengan *bay' bithaman ājil* yang harus diperhatikan :

b. Akad bay' bithaman ājil

c. Harga

- d. Kepemilikan barang

- ³⁵Sultan Remy Sjahdeini *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.....*,186

2) Pada waktu terjadinya penjualan barang oleh bank kepada nasabah, kepemilikan atas barang tersebut harus secara yuridis beralih dari bank kepada nasabah.

e. Ijab dan kabul

Berakhirnya akad *bay' bithaman 'ajil* sama halnya dengan akad yang lain, yaitu :

g. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual

i. Cidera janji³⁸

³⁶Ibid., 234

³⁷ Mulya E Siregar dan Ahmad Buchori *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*,57

³⁸Ibid., 63

Dari beberapa pengertian fatwa diatas, ada beberapa unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa⁴⁰, yaitu :

- ### 3. Dasar Hukum Fatwa

- وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۚ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

⁴¹Ibid.

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

a. Hadist Abu Daud dan Nasa

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ عَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِيهِ عَنْهَا

Artinya : Dari Ibnu Abbas' r.a bahwa Sa'ad bin Ubadah r.a minta fatwa kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sebagai berikut : “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab : “Tunaikanlah nadar itu atas nama ibumu.” (H.R Abu Daud dan Nasai)

1. Proses Penetapan Fatwa

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakini kebenaran ajaran ini. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam Al Qur'an ataupun dalam hadis. Apabila terdapat permasalahan terhadap

Pendapat yang diberikan oleh *mufti* sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan Islam. Meskipun demikian, banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mewajibkan *mustafti* untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak mengikat secara hukum baik bagi orang *mustafti* maupun bagi masyarakat muslim secara umum.⁴²

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada *mustafti* harus didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah dengan penguasaan dan pemahaman atasnya. Dalam perbuatan fatwa (*ifta'*) salah satu syarat yang harus dimiliki oleh *mufti* adalah mengetahui hukum islam secara mendalam. *Mufti* tidak boleh menerapkan suatu persoalan

[illegible]

tanpa didasarkan pada dalil hukum Islam, disebut *tahakkum* (membuat hukum baru).

Proses pembuatan fatwa *ifta'* itu sendiri harus menggunakan metode-metode penerapan hukum. Ma'ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili*, dan metode *istislahi*. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh *mufti. Mustafti* dapat menerima dapat mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.⁴³

2. Fatwa DSN No 27 Tahun 2002

Fatwa DSN No 27 Tahun 2002 ini menjelaskan mengenai *Ijārah Muntahiya Bi Al-Tamlik*. *Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik* adalah suatu inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁴⁴ Kebolehan dilakukannya *Ijārah Muntahiya Al-tamlik* terdapat pada Q.S Zukhruf : 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ^{٥٤}
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا ۖ^{٥٥} وَرَحِمَتْ رَبُّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

⁴³Ibid., 80

⁴⁴Ahmad ifham sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),187

Di dalam Fatwa DSN No 27 tersebut terdapat beberapa ketentuan dibolehkannya dilakukan akad *Ijārah Muntahiya Al-tamlik*, yaitu :

- [illegible]

- ### 3. Legalitas BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000

TDP : 13.26.2.64.00100

SIUP : 517/099/424.061/2003

NPWP : 02.082.190.6-624.000

Alamat Jatim : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan
67151

Telp/Fax : (0343) 423521/(0343)423571

E-mail : bmt.ugtpusat@gmail.com

- #### 4. Struktur Kepengurusan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan

Struktur kepengurusan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan di pimpin oleh bapak Mohammad Hasin (*manager*), dimana kacapem memiliki tugas merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target pelayanan anggota BMT UGT Sidogiri Capem

[illegible]

1. Produk Simpanan

- ⁶Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan
⁷Ibid.

- berjangka untuk membantu merencanakan keuangan masa depan dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi.
- k. Tabungan Tarbiyah merupakan tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa.
2. Produk Pembiayaan
- a. UGT GES (Gadai Emas Syariah) merupakan fa

2. Setelah mengetahui spesifikasi laptop yang diinginkan maka pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan akan mencari laptop tersebut kepada suplier.
3. Suplier akan memberikan laptop tersebut kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dengan harga yang telah disepakati.
4. Kemudian pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan akan menjual laptop tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak serta cara pembayarannya dan nasabah akan membayar uang sewa kepada BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan sesuai dengan kesepakatan.
5. Nasabah membayar uang laptop tersebut beserta uang sewa atas penjualan laptop yang diinginkan.

Lembaga keuangan syariah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mudah dan aman dengan prinsip syariah. Tidak bisa dipungkiri kembali jika adanya lembaga keuangan sangat membantu perekonomian masyarakat dengan beberapa produk-

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan praktik *bay' bithaman ājil* di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dalam hal syarat dan rukun *bay' bithaman ājil* salah satunya terdapat objek yang harus dipenuhi. Namun dalam praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan tidak ada objek dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 27 Tahun 2002 yang menjadi acuan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Dan dari praktik pembiayaan *bay' bithaman ājil* ini tidak mendapatkan data nasabah dikarenakan tidak diperkenankan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

¹⁷Wawancara dengan Ali Ridho, 12 Maret 2019

Syarat dan rukun *bay' bithaman ājil* yaitu 1) Para Pihak, 2) Akad, 3) Harga, 4) Objek, 5) *Ṣighat*. Syarat dan rukun merupakan hal yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Dalam praktiknya di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dalam hal objek tidak ada dalam proses transaksi dan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

Hukum Islam mengatur tentang perjanjian atau suatu kesepakatan yang mana diperlukan adanya *ṣighat* atau ucapan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun perjanjian dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, yakni dalam syarat keabsahan pada saat dilakukannya perjanjian pihak BMT selaku lembaga keuangan tidak menyesuaikan objek dalam akad dan tidak menyesuaikan pengaplikasian akad yang digunakan dalam praktiknya.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah.²

²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), 206

Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002 ini menjelaskan mengenai *Ijārah Muntahiya Bi Al-Tamlik*. *Ijārah Muntahiya Bi Al-Tamlik* merupakan akad atau perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah masa sewa tersebut telah selesai. Pada opsi pemindahan hak milik tersebut terdapat dua opsi yaitu dengan cara hibah atau beli. Objek dari *Ijārah Muntahiya bit Al-Tamlik* adalah berupa barang atau manfaat dari penggunaan barang yang dilaksanakan dalam akad, dimana nasabah akan membayar upah atas barang tersebut secara tunai atau diangsur. Maka *Ijārah Muntahiya bit Al-Tamlik* oleh fatwa DSN MUI diperbolehkan dengan syarat adanya perjanjian yang telah disepakati secara bersama antara para pihak.

Pembiayaan *bay' bithaman ājil* di terapkan dalam produk pembiayaan di *Ijārah Muntahiya Bi Al-Tamlik* Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No 27

[illegible]

1. Sebaiknya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan dalam penerapan pembiayaan *bay' bithaman ājil* menggunakan Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 agar lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya.

[illegible]

- Harahap, Syofian S. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : LPEE-Usakti. 2004
- Haron,Sudin, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek, *Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customer*. International Journal Of Bank Marketing Vol. 12 No. 1 PP. 32-40. Malaysia: MBC University Press.
- Hudan, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta : Kencana. 2010
- Hulwati. *Ekonomi Islam dan Praktinya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta :Ciputat Press. 2009
- Kameel Mydin Meera, Ahamed& Dzuljastri Abdul Razak.*Islamic Home Financing through Musharakah Mutanaqisah and al-Bay' Bithaman Ajil Contracts: A Comparative Analysis*. Malaysia: Department of Business Administration.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analsis Fiqih dan Keuangan*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22
- Kurniawan, Arif. *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Cirebon (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2012.
- Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadist, Hadist Ibnu Majah
- Lulail Yunus, Jamal. *Manajemen Bank Syariah*. Malang: UIN-Malang Press. 2009
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana. 2016
- Mardani. *Fiqh Ekonomi syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2005
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Noor,Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Ridwan, Muhammad *Manajemen Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta., 2005
- Sanrego,Yulizar D. *Falsafah Ekonomi Islam*. Jakarta: Karya Abadi. 2014.
- Sholihin, Ahmad ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*., Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.

- Siregar, Mulya E dan Ahmad Buchori. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta. 2016
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : Prenamedia Group. 2014.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Susanti, Erli. *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga*. Salatiga Skripsi IAIN Salatiga. 2016
- Syafi'i Anthonio, Muhammad. *Bank syariah Dari Teori ke Prakteknya*. Jakarta : Gema Insani. 2001
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : ANDI. 2017.
- Uin Sunan Ampel, MKD. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2013.
- Ulvi, Rukaya. *Analisis Sistem Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta*, Surakarta. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.
- Undang-undang No. 21. 2008. *Perbankan Syariah*
- Usmani, Maulauna Taqi. Islamic Finance; Musharakah & Mudharabah, www.darulu-loomkhi.edu.pk/fiqhislamicfinancemurabahah.html, terakhir dikunjungi 20 Februari 2019
- Wahid, Soleh Hasan. *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. PascaSarjana TulungAgung : TulungAgung. 2016
- Wahyudin, Endang. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta : Kencana. 2014
- Widyanigsih. *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya : UIN SA Press. 2014
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.